

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2019	PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 92 TAHUN 2022
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ASAHAN,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ASAHAN,
Menimbang :	Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;	a. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, kondisi dan keadaan pada saat ini sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
Mengingat :	Mengingat :

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
--	--

<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pe atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);</p>
---	--

<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa dalam Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 18);</p>	<p>8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa dalam Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 18);</p> <p>9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 9);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p>
	<p>Ketentuan ayat (4) Pasal 76 Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 9) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :</p>

BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Asahan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Asahan. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Asahan melalui Sekretaris Daerah. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 	Tetap

<p>diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.</p> <p>11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.</p> <p>12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p>	
--	--

<p>13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.</p> <p>14. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.</p> <p>15. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.</p> <p>16. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.</p> <p>17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.</p> <p>18. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.</p> <p>20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.</p>	
--	--

<p>21. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.</p> <p>22. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.</p> <p>23. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.</p> <p>24. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.</p> <p>25. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.</p> <p>26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.</p>	
---	--

<p>27. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.</p> <p>28. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.</p> <p>29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.</p> <p>30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.</p> <p>31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.</p> <p>32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan</p>	
---	--

<p>yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>33. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.</p> <p>34. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.</p> <p>35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>36. Hari adalah hari kerja.</p>	
<p>BAB II</p> <p>ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</p>	<p>BAB II</p> <p>ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</p>
<p>Pasal 2</p>	<p>Pasal 2</p>
<p>(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.</p>	<p>Tetap</p>

(2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.	
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3	Pasal 3
(1) Maksud pengaturan pengelolaan keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan Desa. (2) Tujuan pengaturan pengelolaan keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari : a. kekuasaan pengelolaan keuangan desa; b. anggaran pendapatan dan belanja desa; c. pengelolaan; dan d. pembinaan dan pengawasan	Tetap

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.</p> <p>(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; d. menetapkan PPKD; e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; f. menyetujui RAK Desa; dan g. menyetujui SPP. <p>(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.</p> <p>(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.</p>	Tetap

Bagian Kedua Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	Bagian Kedua Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 6	Pasal 6
PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas: a. Sekretaris Desa; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan.	Tetap
Pasal 7	Pasal 7
(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa; c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran	Tetap

<p>APB Desa;</p> <p>e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankantugas PPKD; dan</p> <p>f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.</p> <p>(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas:</p> <p>a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;</p> <p>b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan</p> <p>c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.</p>	
<p>Pasal 8</p>	<p>Pasal 8</p>
<p>(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.</p> <p>(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Kaur tata usaha dan umum; dan</p> <p>b. Kaur perencanaan.</p> <p>(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Kasi pemerintahan;</p> <p>b. Kasi kesejahteraan; dan</p> <p>c. Kasi pelayanan.</p>	<p>Tetap</p>

<p>(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. <p>(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing serta diusulkan dan ditetapkan pada saat penyusunan RKP Desa.</p>	
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.</p>	Tetap

<p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua; b. Sekretaris; dan c. anggota. <p>(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.</p> <p>(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan ditetapkan pada saat penyusunan RKP Desa</p> <p>(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.</p> <p>(6) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.</p>	
Pasal 10	Pasal 10
<p>(1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.</p> <p>(2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun RAK Desa; dan 	Tetap

<p>b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.</p> <p>(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.</p>	
<p>BAB IV</p> <p>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA</p>	<p>BAB IV</p> <p>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA</p>
<p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p>	<p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p>
<p>Pasal 11</p>	<p>Pasal 11</p>
<p>(1) APB Desa terdiri dari :</p> <p>a. pendapatan Desa;</p> <p>b. belanja Desa; dan</p> <p>c. pembiayaan Desa.</p> <p>(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.</p> <p>(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.</p> <p>(4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c</p>	<p>Tetap</p>

diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.	
Pasal 12	Pasal 12
Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.	Tetap
Bagian Kedua Pendapatan Desa	Bagian Kedua Pendapatan Desa
Pasal 13	Pasal 13
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: a. pendapatan asli Desa; b. transfer; dan c. pendapatan lain.	Tetap
Pasal 14	Pasal 14
(1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. hasil aset;	Tetap

<p>c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan</p> <p>d. pendapatan asli Desa lain.</p> <p>(2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.</p> <p>(3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.</p> <p>(4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.</p> <p>(5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.</p>	
Pasal 15	Pasal 15
<p>(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:</p> <p>a. dana Desa;</p> <p>b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;</p> <p>c. alokasi dana desa;</p>	Tetap

<p>d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan</p> <p>e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.</p> <p>(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.</p> <p>(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).</p>	
<p>Pasal 16</p>	<p>Pasal 16</p>
<p>Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas:</p> <p>a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa</p> <p>b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;</p> <p>c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;</p> <p>d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;</p>	<p>Tetap</p>

e. bunga bank; dan f. pendapatan lain Desa yang sah.	
Bagian Ketiga Belanja Desa	Bagian Ketiga Belanja Desa
Pasal 17	Pasal 17
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.	Tetap
Pasal 18	Pasal 18
(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang: a. penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. pelaksanaan pembangunan Desa; c. pembinaan kemasyarakatan Desa; d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan	Tetap

<p>sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa</p> <p>(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.</p>	
Pasal 19	Pasal 19
<p>(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:</p> <p>a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dana operasional pemerintahan Desa;</p> <p>b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;</p> <p>c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;</p> <p>d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan</p> <p>e. pertanahan.</p> <p>(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:</p> <p>a. pendidikan;</p> <p>b. kesehatan;</p> <p>c. pekerjaan umum dan penataan ruang;</p>	Tetap

<ul style="list-style-type: none"> d. kawasan permukiman; e. kehutanan dan lingkungan hidup; d. perhubungan, komunikasi dan informatika; e. energi dan sumber daya mineral; dan f. pariwisata; <p>(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; b. kebudayaan dan kegamaan; c. kepemudaan dan olah raga; dan d. kelembagaan masyarakat <p>(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelautan dan perikanan; b. pertanian dan peternakan; c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; f. dukungan penanaman modal; dan g. perdagangan dan perindustrian. <p>(5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:</p>	
--	--

<ul style="list-style-type: none"> a. penanggulangan bencana; b. keadaan darurat; dan c. keadaan mendesak. 	
Pasal 20	Pasal 20
<ul style="list-style-type: none"> (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan. (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama. (3) Bupati menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99. (4) Bupati menambahkan kegiatan dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a. (5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tanah Bengkok di atur dengan Peraturan Bupati. 	Tetap

(7) Rincian Sub Bidang yang dibagi dalam Kegiatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
Pasal 21	Pasal 21
Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang/jasa; c. belanja modal; dan d. belanja tak terduga.	Tetap
Pasal 22	Pasal 22
(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa. (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat $\frac{1}{2} n$ (bulan) + 1 setiap bulannya.	Tetap

<p>(5) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.</p>	
<p>Pasal 23</p>	<p>Pasal 23</p>
<p>(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. operasional pemerintah Desa; b. pemeliharaan sarana prasarana Desa; c. kegiatan sosialisasi/ rapat/ pelatihan/ bimbingan teknis; d. operasional BPD; e. insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga; dan f. pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat. <p>(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.</p>	<p>Tetap</p>

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.	
Pasal 24	Pasal 24
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.	Tetap
Pasal 25	Pasal 25
(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan c. berada di luar kendali pemerintah Desa.	Tetap

<p>(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.</p> <p>(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.</p> <p>(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pembiayaan Desa</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pembiayaan Desa</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p>
<p>(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan. 	
Pasal 27	Pasal 27
<p>(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SiLPA tahun sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; dan c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. <p>(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.</p> <p>(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.</p> <p>(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.</p>	Tetap

Pasal 28	Pasal 28
<p>Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, terdiri atas :</p> <p>a. pembentukan dana cadangan; dan</p> <p>b. penyertaan modal.</p>	Tetap
Pasal 29	Pasal 29
<p>(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.</p> <p>(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <p>a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;</p> <p>b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;</p> <p>c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;</p> <p>d. sumber dana cadangan; dan</p> <p>e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.</p>	Tetap

<p>(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.</p>	
<p>Pasal 30</p>	<p>Pasal 30</p>
<p>(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa.</p> <p>(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; d. sumber dana cadangan; dan e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 	<p>Tetap</p>

<p>(4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.</p> <p>(6) Untuk kriteria tanah dan bangunan tidak dapat dijual, disita, dijadikan jaminan atau diambil pada saat BUMDesa pailit atau bangkrut.</p> <p>(7) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan.</p> <p>(8) Proses analisis kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan b. Indikator analisa kelayakan penyertaan modal. <p>(9) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa Proposal usulan Penyertaan Modal Desa paling sedikit memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan ; b. Mekanisme Pengelolaan usaha ; c. Rencana penggunaan dana, yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana Anggaran Biaya 	
---	--

<p>2. Perencanaan Keuangan</p> <p>d. Penutup.</p> <p>(10) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal yang dapat disertakan berupa Proposal usulan Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus termuat dalam RPJMDesa dan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk dilakukan kajian paling lambat sebelum ditetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(11) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa laporan hasil evaluasi dan penilaian kelayakan usaha dari Perangkat Daerah yang menangani BUMDesa.</p>	
<p>BAB IV PENGELOLAAN</p>	<p>BAB IV PENGELOLAAN</p>
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	<p>Bagian Kesatu Umum</p>
<p>Pasal 31</p>	<p>Pasal 31</p>
<p>Pengelolaan keuangan Desa meliputi:</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. pelaksanaan;</p> <p>c. penatausahaan;</p>	<p>Tetap</p>

d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban.	
Pasal 32	Pasal 32
(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan Basis Kas. (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).	Tetap
Bagian Kedua Perencanaan	Bagian Kedua Perencanaan
Pasal 33	Pasal 33
(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati Asahan setiap tahun yang paling sedikit memuat:	Tetap

<p>a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;</p> <p>b. prinsip penyusunan APB Desa;</p> <p>c. kebijakan penyusunan APB Desa;</p> <p>d. teknis penyusunan APB Desa; dan</p> <p>e. hal khusus lainnya.</p> <p>(3) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	
<p>Pasal 34</p>	<p>Pasal 34</p>
<p>(1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.</p> <p>(4) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa, wajib di evaluasi oleh Bupati yang di delegasikan kepada Camat.</p>	<p>Tetap</p>

<p>(5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.</p> <p>(6) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat pengantar; b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa; c. peraturan Desa mengenai RKP Desa; d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan g. berita acara hasil musyawarah BPD. <p>(7) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.</p>	
Pasal 35	Pasal 35
<p>(1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), Kepala Desa</p>	

<p>menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.</p> <p>(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
<p>Pasal 36</p>	<p>Pasal 36</p>
<p>(1) Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.</p> <p>(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.</p> <p>(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.</p> <p>(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.</p> <p>(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama</p>	<p>Tetap</p>

BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.	
Pasal 37	Pasal 37
<p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.</p> <p>(2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.</p> <p>(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.</p>	Tetap

Pasal 38	Pasal 38
<p>(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa harus memperoleh Nomor Registrasi yang dikeluarkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.</p> <p>(3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</p> <p>(4) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.</p> <p>(5) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.</p>	<p>Tetap</p>

Pasal 39	Pasal 39
<p>(1) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakanpagu tahun sebelumnya.</p> <p>(2) Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. Pembayaran Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; c. Pembayaran Operasional Pemerintah Desa; d. Pembayaran tunjangan BPD dan staf administrasi; dan e. Pembayaran Operasional BPD. <p>(3) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib di evaluasi oleh Camat.</p>	<p>Tetap</p>

Pasal 40	Pasal 40
<p>(1) Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. APB Desa; b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan c. alamat pengaduan. 	Tetap
Pasal 41	Pasal 41
<p>(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan 	Tetap

<p>d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.</p> <p>(3) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dilakukan pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan, kecuali dalam keadaan luar biasa.</p> <p>(4) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi peristiwa khusus seperti Bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.</p>	
<p>Pasal 42</p>	<p>Pasal 42</p>
<p>(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.</p> <p>(2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:</p>	<p>Tetap</p>

<p>a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa padatahun anggaran berjalan;</p> <p>b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antarobjek belanja; dan</p> <p>c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Asahan melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.</p> <p>(4) Kepala Desa dilarang melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa tahun anggaran berjalan.</p>	
<p>Pasal 43</p>	<p>Pasal 43</p>
<p>Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketiga Pelaksanaan</p>	<p>Bagian Ketiga Pelaksanaan</p>

Pasal 44	Pasal 44
<p>(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.</p> <p>(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.</p> <p>(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.</p>	Tetap
Pasal 45	Pasal 45
<p>(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.</p>	Tetap

Pasal 46	Pasal 46
Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.	Tetap
Pasal 47	Pasal 47
<p>(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.</p> <p>(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa; b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan c. Rencana Anggaran Biaya. <p>(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.</p> <p>(4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.</p> <p>(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.</p>	Tetap

<p>(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
<p>Pasal 48</p>	<p>Pasal 48</p>
<p>(1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.</p> <p>(2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 49</p>	<p>Pasal 49</p>
<p>(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.</p> <p>(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. 	<p>Tetap</p>

<p>(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.</p> <p>(5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.</p>	
Pasal 50	Pasal 50
<p>(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.</p> <p>(2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.</p> <p>(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.</p> <p>(4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.</p>	Tetap

Pasal 51	Pasal 51
RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.	Tetap
Pasal 52	Pasal 52
(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain. (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Tetap
Pasal 53	Pasal 53
(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa. (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.	Tetap

<p>(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.</p>	
<p>Pasal 54</p>	<p>Pasal 54</p>
<p>(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.</p> <p>(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.</p>	<p>Tetap</p>

<p>(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.</p>	
<p>Pasal 54</p>	<p>Pasal 54</p>
<p>(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.</p> <p>(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 56</p>	<p>Pasal 56</p>
<p>(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.</p>	<p>Tetap</p>

<p>(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.</p> <p>(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.</p> <p>(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.</p> <p>(5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.</p> <p>(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p>
<p>(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p>(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat. <p>(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. <p>(4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.</p> <p>(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.</p>	
Pasal 58	Pasal 58
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan	Tetap

laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.	
Pasal 59	Pasal 59
(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa. (2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. (4) Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desaditetapkan.	Tetap
Pasal 60	Pasal 60
(1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Tetap

<p>(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.</p> <p>(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 61</p>	<p>Pasal 61</p>
<p>Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dianggarkan dalam APB Desa.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 62</p>	<p>Pasal 62</p>
<p>(1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; dan b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. <p>(2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.</p>	<p>Tetap</p>

<p>(3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.</p> <p>(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.</p> <p>(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.</p>	
<p>Pasal 63</p>	<p>Pasal 63</p>
<p>(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dicatatkan dalam Catatan</p>	<p>Tetap</p>

<p>atas Laporan Keuangan.</p> <p>(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.</p> <p>(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.</p> <p>(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.</p> <p>(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.</p>	
Pasal 64	Pasal 64
<p>(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.</p> <p>(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.</p>	Tetap
<p>Bagian Keempat</p> <p>Penatausahaan</p>	<p>Bagian Keempat</p> <p>Penatausahaan</p>

Pasal 65	Pasal 65
<p>(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.</p> <p>(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</p> <p>(3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.</p>	Tetap
Pasal 66	Pasal 66
<p>(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. buku pembantu bank; b. buku pembantu pajak; dan c. buku pembantu panjar. <p>(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.</p> <p>(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.</p>	Tetap

(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.	
Pasal 67	Pasal 67
Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara: a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten; b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantorpos oleh pihak ketiga; dan c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.	
Pasal 68	Pasal 68
(1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. (2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan	Tetap

<p>oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.</p> <p>(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.</p> <p>(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.</p> <p>(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.</p> <p>(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.</p>	
<p>Pasal 69</p>	<p>Pasal 69</p>
<p>(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.</p>	<p>Tetap</p>

Bagian Kelima Pelaporan	Bagian Kelima Pelaporan
Pasal 70	Pasal 70
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati Asahan melalui camat. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. laporan realisasi kegiatan. (3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Tetap
Pasal 71	Pasal 71
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.	Tetap
Bagian Keenam Pertanggungjawaban	Bagian Keenam Pertanggungjawaban
Pasal 72	Pasal 72
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi	Tetap

<p>APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :</p> <p>a. laporan keuangan, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan. <p>c. laporan realisasi kegiatan; dan</p> <p>d. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.</p> <p>(4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.</p> <p>(5) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didelegasikan oleh Bupati kepada Camat.</p>	
Pasal 73	Pasal 73
<p>(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan</p>	Tetap

Desa akhir tahun anggaran. (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.	
Pasal 74	Pasal 74
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 72 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. laporan realisasi APB Desa; b. laporan realisasi kegiatan; c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d. sisa anggaran; dan e. alamat pengaduan.	Tetap
Pasal 75	Pasal 75
Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa, DPA, DPPA, RAK Desa, Buku Pembantu	Tetap

<p>Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p>
<p>(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang membidangi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan pembangunan daerah; b. keuangan daerah; 	<p>Ketentuan Pasal 76 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang membidangi :</p>

<p>c. pendapatan daerah; d. pengadaan barang/jasa pemerintah; dan e. pembentukan produk hukum daerah.</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.</p>	<p>a. perencanaan pembangunan daerah; b. keuangan daerah; c. pendapatan daerah; d. pengadaan barang/jasa pemerintah; dan e. pembentukan produk hukum daerah.</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Asahan dan Camat.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p>
<p>(1) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa Persiapan.</p> <p>(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Pasal 78	Pasal 78
Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79	Pasal 79
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 80	Pasal 80
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.	Tetap
	Pasal II
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

<p>Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 18 Februari 2019 BUPATI ASAHAN, ttd</p>	<p>Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI ASAHAN, ttd</p>
<p>TAUFAN GAMA SIMATUPANG</p>	<p>S U R Y A</p>
<p>Diundangkan di Kisaran pada tanggal 18 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd TAUFIK ZAINAL ABIDIN</p>	<p>Diundangkan di Kisaran pada tanggal 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, ttd JOHN HARDI NASUTION</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 9</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 93</p>